

MAJALAH POLITIK & EKONOMI

harga: rp. 30.000

TEKAS

edisi desember 2012

Dibalik Sukses BTDI 2012

Pengalaman Adalah Guru Terbaik

Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

(Tulisan Kedua dari Tiga Tulisan)

PARA ahli ekonomi Barat umumnya mendefinisikan pembangunan sebagai upaya peningkatan kemampuan perekonomian bertumbuh stabil dan konsisten dalam jangka panjang. Todaro (2003) mendefinisikan pembangunan (*development*) keterpaduan antara pertumbuhan (*growth*) dan perubahan (*changes*). Sedangkan Sen (1999) mendefinisikan pembangunan sebagai upaya dan proses pemberdayaan rakyat (*empowerment*). Jika keseluruhan pandangan tersebut dilebur maka kata pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai proses dan upaya peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan peningkatan kapasitas produksi nasional. Bila mengacu kepada pemikiran ekonom Klasik, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bukan saja bersumber dari peningkatan kuantitas input tetapi juga peningkatan efisiensi penggunaan input. Penambahan jumlah output dapat dilaku-

kan dengan menambah stok barang modal (investasi) dan menambah jumlah tenaga kerja. Peningkatan efisiensi penggunaan input dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang lebih tinggi, peningkatan kualitas SDM dan meningkatkan kemampuan manajerial.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tidak perlu diidentikkan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Sebab pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dapat menjadi bumerang, karena memicu inflasi yang juga mungkin sangat tinggi, memperburuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa negara-negara yang memaksakan pencapaian laju pertumbuhan yang tinggi dan ambisius, harus membayar mahal dalam bentuk tingginya inflasi, hilangnya akses rakyat kecil terhadap sumber daya alam, infrastruktur dan sumber daya keuangan. Hal ini disebabkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi tersebut, mereka harus bersedia menjual kekayaan alam, potensi kepen-

udukan kepada perusahaan-perusahaan multi nasional. Mereka juga harus menanggung dalam jumlah besar, yang belum tentu dapat dikelola dengan baik. Hal ini pernah dialami Indonesia selama periode 1970an-1980an. Sebagai penghasil minyak bumi, Indonesia menikmati rejeki yang sangat besar akibat kenaikan harga minyak bumi Internasional (*oil boom*), yang memungkinkan dipacunya pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan penerimaan devisa yang sangat besar. Tetapi pada periode tersebut Indonesia justru mengalami inflasi yang tinggi dan beberapa penyakit ekonomi lainnya. Dalam literatur ekonomi gejala di atas dikenal sebagai *Dutch Disease* (Woo, Glassburner, Nasution, 1994)

Pertumbuhan yang berkualitas, juga merupakan hasil interaksi yang demokratis antara sisi penawaran agregat dengan sisi permintaan agregat. Para pekerja, pengusaha seharusnya diberi keleluasaan untuk bekerja dan memproduksi. Akhirnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas pada hakekat-

nya adalah pertumbuhan ekonomi yang dinamis, holistik, futuristik dan bersifat antisipatif. Dapat juga dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang dirancang secara seksama dan berorientasi jauh ke depan. Karena itu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tidak akan pernah tercapai tanpa campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah yang bertujuan memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi inilah yang disebut rencana pembangunan dan atau kebijakan pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people centred, participatory, empowering, and sustainable*" (Chambers, 1995). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belaka-

ngan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman (1992) disebut sebagai *alternative development*, yang menghendaki *'inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity'*". (Kartasasmita, Ginanjar 1997)

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu (Sumodiningrat, Gunawan, 2002) ; **Pertama**, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. **Kedua**, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini

adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, kebudayaan, pengamalan demokrasi. **Ketiga**, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

Melindungi tidak berarti isolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Di samping itu, dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada masyarakat sehingga mereka dapat merasa ikut bertanggung jawab dan merasa memiliki program-program pembangunan yang jelas akan sangat menguntungkan bagi pelaksanaannya. Oleh karena itu, pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan fenomena yang tak dapat diabaikan dan sangat bernilai bagi keberhasilan suatu pembangunan. Partisipasi masyarakat akan mendorong perencanaan anggaran dan program-program atau kegiatan-



an-kegiatan yang akan diimplementasikan akan berjalan secara transparan. Dengan adanya transparansi tersebut akan mendorong pertanggungjawaban para aparatur terkait dengan anggaran dan program-program yang telah dilaksanakan tersebut. Ini menunjukkan dengan adanya partisipasi akan membuka upaya transparansi, akuntabilitas dan keadilan. (*)

**Dr. Ignatia Martha
Hendrati, SE, ME**

**(Kepala Pusat Studi Ekonomi,
Bisnis dan Kebijakan Publik UPN
Veteran Jawa Timur)**